

ABSTRAK

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS memerlukan berbagai pendekatan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak yang saling terintegrasi. Keterlibatan pemerintah sangatlah penting, sebagaimana ditandai dengan adanya Ottawa Charter for Health Promotion dimana disebutkan pembuatan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan merupakan indikator penting dalam rangka pembangunan kesehatan terlebih dengan adanya sistem pembagian kewenangan (desentralisasi). Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari kesiapan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya penerbitan PERDA Penanggulangan HIV & AIDS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan indepth interview ke-8 orang informan yang merupakan representatif dari lembaga terkait. Subyek diambil dengan metode Purposive Sampling.

Hasil penelitian dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pembuatan produk hukum daerah mengacu pada Permendagri No. 80 tahun 2015 dan Undang-undang No. 12 tahun 2011, Pelaku kebijakan telah memiliki pengetahuan dan persepsi yang baik serta tidak mengalami resistensi terhadap upaya penerbitan PERDA Penanggulangan HIV & AIDS, jumlah kasus HIV & AIDS setiap tahunnya mengalami peningkatan yang ditenggarai disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran dan peran stake holder yang kurang, tokoh Agama dan Adat mendukung terbentuknya PERDA dan mengusulkan ditutupnya lokalisasi, media massa belum mengambil peran yang banyak dalam pemberian informasi seputar HIV & AIDS.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pelaku kebijakan belum siap untuk menerbitkan PERDA Penanggulangan HIV & AIDS dikarenakan belum melakukan langkah-langkah konkrit yaitu belum memasukkan Draft PERDA dalam agenda Prolegda DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan, PERDA, HIV & AIDS